

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik dinasti merupakan suatu proses regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan elit politik yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara menempatkan keluarga atau kerabatnya pada posisi tertentu dalam bidang pemerintahan. Menurut buku dengan judul Fenomena Politik Pemerintahan Desa : Politik dinasti merupakan sekumpulan orang atau elit penguasa yang masih memiliki hubungan keluarga dekat yang saling mendukung dan secara bergantian menduduki kekuasaan melalui pemilihan pada periode masing-masing.

Menurut Leo Agustino politik dinasti adalah “kerajaan politik” dimana elit politik menempatkan keluarga, saudara, dan kerabatnya di beberapa posisi penting pemerintahan baik lokal ataupun nasional, atau bisa dikatakan membentuk strategi semacam jaringan kerajaan yang terstruktur dan sistematis. Proses pergantian pimpinan merupakan sebuah pertarungan politik yang sangat menyerap beragam energi.¹ Pada sebuah pergantian kepemimpinan di negeri ini, pertarungan bukan semata pada seorang pemimpin yang akan memimpin organisasi, namun lebih dari itu, ruang pertarungan berada pada pertempuran ideologi. Begitu kuatnya pertarungan, terkadang mengundang kedatangan para pendahulu organisasi. Entah apa yang mereka cari, bisa jadi untuk melanggengkan kekuasaan, ataupun untuk menguji nyali dan sisa remah-remah intervensi yang dimiliki ataupun merupakan sebuah upaya memperpanjang benang keturunan. Kota Bontang termasuk tempat dimana seorang yang ingin memimpin harus mengalahkan salah satu orang yang sudah lama menjadi pemimpin dan masih ingin melanjutkan kepemimpinan mereka untuk Kota Bontang yang lebih baik.

¹ Agustino, Leo. (2014). Politik Lokal & Otonomi Daerah. Bandung: Alfabeta.

Politik dinasti ada beberapa model. Model politik dinasti di Indonesia menurut Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah ada tiga. Pertama model arisan, dimana kekuasaan hanya menggumpal pada satu atau keluarga, dan berjalan secara regenerasi. Kedua, dinasti politik lintas kamar dengan cabang kekuasaan. Misalnya kakak jadi bupati, adik jadi ketua DPRD, anggota keluarga memegang posisi strategis. Ketiga, model lintas daerah. Daerah beda dipimpin masih dalam satu keluarga.²

Perkembangan Indonesia sebagian menunjukkan kepada dimana dinasti politik itu dimanipulasi dengan elit local dan menjadikan ancaman bagi demokrasi. Para elit local memiliki akses pada lembaga-lembaga pusat dan mengandalkan konstituen local yang digalang melalui jaringan yang memperkuat dan mempertahankan hubungan patron-klien daerah. Tetapi, politik dinasti juga tumbuh dalam masyarakat monarki yang dimana kekuasaan sudah jelas pasti akan jatuh kepada putra mahkota raja dari sebuah keluarga. Politik dinasti juga ada melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap segala macam prosedur demokrasi. Sehingga mereka seakan-akan tidak memberikan kesempatan pihak lain untuk melakukan regenerasi dan kaderisasi. Untuk membangun politik dinasti mereka melakukan mekanisme yang sudah terstruktur, meskipun hakekatnya tidak sesuai dengan substansi demokrasi.

Dalam analisis modern kemunculan politik dinasti diakibatkan oleh adanya kemandulan demokrasi. Sebab, hal ini yang kemudian secara structural mengakibatkan otonomi overdosis sehingga muncul kekuasaan etnis di daerah. Etnisitas ini menjadikan tumbuhnya dinasti, sementara etika politik rendah karena kaderisasi partai politik yang tidak berjalan dengan baik. Yang menyebabkan otonomi overdosis munculnya kekuasaan etnis di daerah dengan adanya para politisi partai. Gaganya etnisitas otonomi daerah yang seharusnya menjadi media aktualisasi potensi-potensi local, justru melahirkan raja-raja baru yang tidak kalah eksploitasinya dengan system sentralistik.

Perihal masyarakat di suatu daerah sudah seharusnya memberikan sajian demokrasi yang bersih dan bermartabat. Munculnya ketergantungan organisasi partai pada

² <https://nasional.tempo.co/read/833610/3-jenis-dinasti-politik-di-indonesia-mulai-model-arisan-hingga-lintas-kamar>, diakses 18 September 2020, 20.30

figure pemimpin pucaknya ketimbang kinerja secara keseluruhannya sebagai instrument untuk melegitimasi kekuasaan. Dimana ketergantungan figure politik ini menyebabkan ranah politik dinasti atau politik kekerabatan akan muncul di dinamika politik selanjutnya. Praktik politik kekerabatan menjadi sah dilakukan apabila kandidat terkait dapat dipercaya dari segi kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Apabila terdapat kandidat yang terikat kekerabatan menyalahi aturan yang ada sebaiknya diberikan sanksi yang tegas dan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Dan seharusnya, masyarakat lebih mengetahui bahawa suatu proses politik itu ditangan rakyat bukan organisasi yang menggunakan hak mereka dengan memilih.

Dalam budaya feodalisme yang kental, dari sisi penguasa terlihat adanya kecenderungan berperilaku untuk selalu ingin dihormati, sementara dari sisi masyarakat terdapat kecenderungan untuk menganggap tinggi mereka yang memiliki status jabatan dan kekayaan. Masyarakat dengan kultur feodal berpendapat bahwa para pemimpin atau pejabat memang sudah merupakan suratan sebagai pemimpin atau pejabat, dan arena jabatannya penguasa harus dihormati dan dituruti. Masyarakat kurang memahami bahwa dalam pemerintahan yang menganut paham demokrasi, setiap orang (rakyat) bisa menjadi pejabat dan bisa punya kekayaan asalkan memiliki ilmu pengetahuan. Dengan demikian keturunan pejabat bisa saja menjadi pemimpin atau pejabat, tetapi bukan karena mereka anak pemimpin/pejabat, tetapi karena memang memiliki pengetahuan dan layak untuk menjadi pemimpin. Para keturunan pejabat itu memiliki pengetahuan karena mereka lebih banyak memiliki dan diberi kesempatan, diterima saja oleh rakyat dengan pasrah dan tanpa protes, karena dianggap itu sudah hak mereka sebagai anak pejabat, padahal rakyat memiliki hak yang sama. Bisa juga kepasrahan itu karena ketidak berdayaan, dalam pemikiria walaupun protes, nasib mereka tetap sama, bahkan bisa ada biaya yang harus dibayar untuk itu.

Pengertian dinasti politik adalah tren politik kekerabatan. Indikasi munculnya praktik politik dinasti di Kota Bontang sudah terlihat sejak pilihan Walikota Bontang tahun 1999-2011 pada kepemimpinannya suami yaitu Andi Sofyan Hasdam.. Ketika itu, Neni Moernaeni telah menjabat sebagai Ketua DPRD Bontang pada tahun 2008, setelah tahun 2014-2015 Neni Moernaeni menjadi Anggota DPR dan pada tahun 2016-2021 Neni

Moernaeni menjadi Walikota Bontang. Dengan kepemimpinannya sekarang Neni Moernaeni mencalonkan kembali menjadi calon walikota Bontang untuk tahun 2021-2024. Dimana kualitas SDM dan kelembagaan parpol yang masih lemah banyak alasan mengapa politik dinasti tumbuh dengan subur. Ada banyak alasan politik dinasti tumbuh subur, baik dilihat dari factor budaya, kognitif-emosional, maupun social-ekonomi. Kecenderungan pengkultusan tokoh yang dikeilingi jejak feodalisme yang masih tampak jelas, struktur dan interaksi social yang masih bekesenjangan antar warga dalam ekonomi dan pendidikan, bisa jadi dengan alasan itu kekuatan dan keutamaan tokoh menjadi khusus.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pembentukan Dinasti Politik di Kota Bontang dan Bagaimana Praktiknya dalam Pemerintahan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai upaya kepemimpinan Pemerintah Kota Bontang di bawah kepemimpinan Neni Moernaeni pasca kasus politik dinasti di Kota Bontang dan untuk menganalisis bagaimana pengaruh kepentingan politik Walikota Neni Moernaeni di dalam pelaksanaan upaya meningkatkan kepercayaan Pemerintah Kota Bontang menjelang Pilkada 2021. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi kajian-kajian mengenai upaya membangun kepercayaan publik dan reformasi birokrasi.

1.4 Manfaat

- a. Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana penegakan hukum pemerintah guna menjaga stabilitas kehidupan bangsa dan Negara tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
- b. Secara praktis penulisan ini dapat memberikan pemahaman kepada diri saya dalam pribadi untuk lebih mengerti terhadap politik local.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Politik Dinasti

Dinasti merupakan sistem reproduksi kekuasaan di era primitif karena hanya mengandalkan satu darah atau keturunan untuk menguasai kekuasaan.³ Secara tersirat dari pengertian politik dinasti sebenarnya adalah musuh dari demokrasi. Karena hakekatnya demokrasi mengandung pengertian rakyat sebagai suara mutlak dalam memilih penguasa. Artinya suara rakyat dalam dinasti politik tidak terakomodir. Dinasti politik mematikan suara rakyat dalam hal memilih pemimpin. Sementara itu memaknai politik dinasti sebagai upaya seorang penguasa atau pemimpin baik di tingkat presiden/bupati/walikota yang telah habis masa jabatannya, untuk menempatkan keluarganya sebagai calon penggantinya atau penerus penguasa sebelumnya untuk periode berikutnya.⁴

Istilah kekuasaan (power) sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sanggup untuk membuat sesuatu, sanggup untuk mempengaruhi orang, sanggup membuat perubahandan tanpa kekuasaan sesuatu tidak akan terjadi. Miriam Budihardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengartikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku, dengan kata lain kekuasaan dapat diartikan dengan kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh

³ Susanti, Martien Herna. 2017. "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia". *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 2, 111-119. *Journal of Government and Civil Society* Vol. 1, No. 2, September 2017, pp. 111-119

⁴ Soemiarno, Slamet. (2010). *Buku Ajar III Bangsa, Budaya, dan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Balai Penerbit UI.

dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.⁵

Politik dinasti adalah fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Dinasti politik yang dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun-temurun atau dilakukan oleh salah keluarga ataupun kerabat dekat (Novendra Bimantara, 2018).⁶ Rezim politik ini terbentuk dikarenakan concern yang sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan dan biasanya orientasi dinasti politik ini adalah kekuasaan. Dinasti dalam politik menciptakan suatu lingkaran kekuasaan diimana kedudukan keluarga, anak, dan koleganya (Abdurrahman, 2015, hlm.108). Lingkaran kekuasaan tersebut mencakup pada jabatan yang strategis yang bersifat satu garis instruksi maupun koordinasi dan jabatan yang didapat dari pemilihan umum seperti pilkada untuk menjadi pemimpin di suatu daerah.

Dalam kaum elit mereka akan mendapatkan keistimewaan politik dan elit local dalam menjadikan mereka sebagai pemimpin. Dinasti Politik dalam ranah politik local sangatlah berbeda dengan konteks dinasti politik yang terjadi dileel nasional. Dalam ranah local lebih meromantisikan nama besar mereka yang sudah familisime dalam menjamin suatu politik dinasti yang dapat menjadi eksis secara terus-menerus. Pola pengajuan kandidat bisa dilakukan secara spontan untuk menghalangi kandidat lain untuk maju dalam proses pengajuan kandidat. Dapat dikatakan bahwa hubungan kekeluargaan menjadi patokan politik guna mengamankan kekuasaan daerah. Dalam model seperti ini kerap muncul transisi bahwa kekuasaan daerah hanya terjadi dalam satu rumah saja. Kekuasaan tidak dilakukan dengan begitu baik, melainkan hanya mengejar pragmatism politik saja. Masyarakat hanya menilai bahwa kerabat yang dicalonkan merupakan calon yang bisa diandalkan saat mereka terpilih menjadi pemimpin.

⁵ Miriam Budiarto, Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

⁶ Novendra Bimantara yang berjudul "ANALISIS POLITIK DINASTI DI KABUPATEN KEDIRI", Universitas Diponegoro, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21909> diakses pada 10 Desember 2019, pukul 07.23

Djati (2013) dinasti politik merupakan akses negative dari otonomi daerah yang menjadikan demokrasi terjebak (*Hijacked Democracy*) oleh sirkulasi hubungan inti Genealogis, berdasarkan relasi kekurangan maupun di luar garis genealogis yang memiliki kepentingan terhadap pelanggan kekuasaan keluarga. Secara tidak langsung mengatakan, bahwa dinasti politik itu tidak selalu memiliki citra buruk di mata warga negara. Hal ini karena praktek demokrasi kepartaian selama lebih kurang satu setengah dekade terakhir semakin oligarkis dan proses rekrutmen politik didominasi oleh kapital. Persaingan elite politik tidak didasarkan atas kualitas komitmen mereka terhadap kebijakan publik yang memihak rakyat, melainkan transaksi kepentingan kekuasaan. Hal ini sudah barang tentu menjadi tanda lemahnya pengelolaan partai politik. Dalam pembangunan pada masa jabatan Neni Moernaeni banyak penghargaan yang didapat dari hasil beliau menjabat. Keputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 33/PUU-XIII/2015, yang menyatakan Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bertentangan dengan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, mencemaskan banyak kalangan karena dianggap semakin menyuburkan politik dinasti.⁷ Hal ini terjadi di Kota Bontang dalam penyelenggaraan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Hal ini kemudian memicu kalangan kerabat menjadi elit sebagai pemahaman dalam dinasti politik. Menurut Bathoro (2015, hlm. 115-125) dinasti politik dalam politik modern dikenal sebagai elit politik yang pberbasis pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarki politik. Kelompok elit adalah sekelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka kadang relative mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan. Dalam partai ada dua pilihan yaitu partai nasional dan partai agama, setelahnya termasuk partai elite. Dimana partai berpindah dari satu partai ke partai lainnya untuk memiliki arus aliran agar bisa menunjukkan loyalitas lembaga itu baik atau buruk. Partai yang mengakses semua golongan, partai dengan representasi

⁷ Budhy Prianto, Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, , 2016, PUBLISIA (*Jurnal Ilmu Administrasi Publik*).

kelas sosial, dan partai dengan diferensiasi paham masyarakat. Tak heran jika “partai fraksi” muncul pasca kongres kekalahan dalam pemilihan. Kemunculan pernyataan politisi yang mendeklarasikan diri sebagai klien atas patron yang sedang berkuasa, bukan anggota, apalagi aktor politik. Parpol bukan menjadi organisasi politik, melainkan pelembagaan kepentingan yang membajak demokrasi dengan pola dan motif pemburu. Pemilihan bukan sekadar prestise partai sebagai organisasi, melainkan bagian dari driving goals. Perilaku partai mengikuti logika ini. Jika partai kalah di perolehan kursi terbanyak parlemen, belum tentu dia kalah untuk memimpin penyelenggaraan negara pasca-pemilu karena ruang menangkap kursi eksekutif bisa dilakukan tanpa menggantungkan pada proses pemilu legislatif yang sekuensial.

Dinasti dalam system primitive reproduksi kekuasaan karena hal yang bergantung pada darah dan keturunan dari segelintir orang. hal ini menjadi wajar apabila terjadi pada model kerajaan murni. Namun akan menjadi sesuatu yang membahayakan untuk keadaan modern saat ini karena negara-negara umumnya telah menyatakan diri mereka sebagai negara demokratis yang menjunjung nilai-nilai dan prinsip keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat.⁸

1.5.1.1 Terbentuknya Politik Dinasti

Politik dinasti yang muncul di Indonesia menunjukkan beberapa asumsi bahwa dengan berkembangnya dinasti politik, maka kemungkinan besar, rakyat hanya akan disuguhkan aktor-aktor politik yang itu-itu saja yang berasal dari satu keluarga dan tidak jarang, aktor-aktor tersebut menerapkan pola kelakuan politik yang sama mengingat berasal dari sebuah keluarga yang sama.

Dalam Politik Dinasti dimana seorang keluarga memimpin, memegang kekuasaan, dan menjalankan kepemilikan mereka sebagai pemimpin. Kekuasaan adalah seperti anak kandung politik. Maka, politik Dinasti pun bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dengan kepentingan pribadi dari politik. Suatu kekuasaan yang memegang kekuasaan

⁸ Nurdin, Nurliah. (2011). Politik Dinasti Tidak Mengenal Batas Negara. Jakarta, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, MIPI Edisi 36.

yang secara turun-temurun dalam garis kekeluargaan. Politik Dinasti biasanya terbentuk karena paham masyarakat disekitarnya rendah dengan pendidikan, masih banyaknya kemiskinan, dan adanya ketimpangan. Dalam tingkat demokrasi rakyat mungkin tidak mengerti atau tidak mempersoalkan tentang siapa yang menjadi pemimpin selanjutnya dan apa yang akan mereka buat setelah mereka menjadi pemimpin di tempat mereka. Masyarakat sudah merasakan senang bila proses demokrasi sudah dijalankan dan masyarakat juga sudah senang jika mereka mendapatkan imbasnya ekonomi walaupun merasakannya hanya sedikit. Masyarakat pada umumnya kurang memahami tentang bagaimana seorang pejabat bisa menjadi pemimpin kembali dengan periode yang berbeda dengan orang yang sama. Perilaku pemilih lebih di motivasi oleh keyakinan moral dibandingkan dengan pertimbangan untuk memuaskan keuntungan pribadi si pengambil keputusan.⁹ Pemilih lebih mengutamakan kandidat yang memiliki hubungan darah dengan orang yang mereka hormati atau berasal dari daerah yang sama. Dengan demikian keturunan pejabat itu bisa mendapatkan peluang besar dalam menjadi pemimpin walaupun tidak memandang dia orang biasa atau orang pejabat sekalipun, tetapi melainkan karena mereka layak untuk menjadi pemimpin. Keturunan pejabat lebih memiliki pengetahuan yang banyak dan diberi kesempatan dan bahkan kesempatan itu diterima oleh rakyat dengan tanpa protes, karena dianggap sudah haknya sebagai anak pejabat menjadi pemimpin.

Lemahnya fungsi kelembagaan partai politik sebagai pilar demokrasi. Walaupun partai tersebut memiliki system dan mekanisme dalam kepartaian mereka. Kurangnya dana menjadikan parpol dalam menjalankan roda partai maka, merekrut pejabat atau mereka yang memiliki dana besar. Sebagai penduduk yang masih dibilang ekonominya masih rendah dan kemiskinan masih tinggi lalu parpol yang masih lemah dalam pengorganisasian, memungkinkan bahwa Politik Dinasti menjadi salah satu cara bagi mereka untuk menjalankan kembali apa yang mereka lakukan saat mereka memimpin. Sumber korupsi adalah kekuasaan, tepatnya kekuasaan yang absolut. Dinasti politik merupakan akses negative dari otonomi daerah yang menjadikan demokrasi sebagai

⁹ Firman, (2018). Desentralisasi Dan Monoisme Masyarakat (Praktek Elit Lokal Melanggengkan Dominasi), 3, 115–127.

hubungan kekeluargaan(El-Guwanie. G., 2013).¹⁰ Hal yang bisa memicu politik dinasti adalah hubungan kekerabatan yang menjadikan sebagai pemahaman bahwa dinasti elit. Suatu kelompok elit yang menguasai jalannya politik dan pemerintahan. Maka seiring desentralisasi, demokratisasi di daerah justru menjadi proses revitalisasi kekuatan elite lokal atau tradisional untuk berkuasa. Elite lokal berupaya mengukuhkan kembali pengaruhnya sebagai pemain utama. Kewenangan yang sebelumnya hanya ada di pusat, kini digeser ke daerah-daerah. Kepala-kepala daerah itu bisa tumbuh dari bawah (masyarakat). Awalnya tumbuh dari bawah dan disertifikasi (dipilih) dari bawah juga. Tapi sekarang ditarik dari atas (elite lokal). (Kepala daerah) tumbuh dari bawah, dari samping, mungkin dari atas, dan disertifikasinya dari atas.

Pemerintahan yang terdesentralisasi sebenarnya merupakan organisasi yang semi dependen. Artinya, organisasi pemerintahan tersebut memiliki kebebasan (terbatas) bertindak tanpa mengacu pada persetujuan pusat, tetapi statusnya tidak dapat dibandingkan dengan negara berdaulat, Persoalannya tidak sederhana ketika unit-unit pemerintahan yang terdesentralisasi harus dibatasi kewenangan dan diatur hubungan kelembagaannya satu dengan yang lain. Setiap negara pasti mengalami ketegangan bahkan konflik antar unit atau tingkat pemerintahan sebagai akibat dari penataan kelembagaan yang tidak tepat.

1.5.1.2 Sumber Daya Ekonomi sebagai unsur penting dalam Politik Dinasti

Terlepas dari adanya hubungan dinasti politik tersebut, tentu yang tidak bisa terbantahkan adalah mereka memiliki garis tangan memimpin daerah-daerah itu. Mereka menang dalam Pilkada di daerah masing-masing, karena rakyat menginginkannya. Ekonomi politik saat ini mengacu pada studi relasi kuasa dan institusi-institusi dalam masyarakat, dimana mampu mempengaruhi cara mendapatkan dan menetapkan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia.¹¹ Studi tentang ekonomi yang didasarkan pada asumsi apa yang sedang berlangsung dalam perekonomian dan pengaruh relasi kuasa

¹⁰ Gugun el-Guwanie yang berjudul "*Politik Dinasti dan Konstitusionalisme*" 2013

¹¹ Yuniatul Fasikha yang berjudul "EKONOMI POLITIK",
https://www.academia.edu/12101595/EKONOMI_POLITIK diakses pada 11 Desember 2019, pukul 22.15

sosial. Semenjak kepemilikan menjadi sebuah institusi yang menciptakan ketidaksetaraan kekuasaan sosial, pasar dan institusi lain menjadi mutlak politis karena mereka didasarkan pada ketidakseimbangan kekuasaan sosial.

Dinasti politik atau politik kekeluargaan dimengerti sebagai praktik membangun kekuasaan yang menggurita oleh sejumlah orang yang masih memiliki kaitan kekerabatan. Dalam kasus Atut, istilah tadi bahkan distempel konotasi buruk, yakni kekuasaan kekerabatan yang cenderung koruptif dan melambatkan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Secara riil, dampak dinasti politik sangat tergantung dari konteks sejarah negara masing-masing dan relasi sosial yang berkembang bersamaan dengan tumbuhnya dinasti politik. Politik Dinasti adalah satu realita yang tak terbantahkan, dan tidak bisa dihindari apapun bentuk Pemerintahan satu Negara(Kompasiana.com, 2013).¹² Akan tetapi, berbeda yang terjadi di Indonesia, praktik politik dinasti terpilih bukan karena kualitas sang kandidat, namun hanya numpang popularitas dari nama elit terdahulunya. Dan ironisnya banyak dari mereka ujung-ujungnya hanya orientasi materi belaka, bahkan ada yang korupsi.

Ketika demokrasi berjalan, maka ia harus dan wajib memberikan kesejahteraan atau kebaikan kepada masyarakat. Budaya yang otoritarian yang tertanam dalam system demokrasi pemerintahan local membutuhkan waktu yang lama untuk membuat masyarakat menjadi heterogen. Tidak selamanya demokrasi bersifat baik terhadap masyarakat. Tidak ada jaminan bahwa demokrasi adalah rezim zona nyaman yang mudah dibangun oleh penguasa. Dalam politik dinasti kota bontang, masyarakat dipimpin dengan pengusaha yang berbeda. Masyarakat dibuat percaya terhadap kepemimpinan Bunda Neni saat ini. Secara sederhana pimpinan kota bontang bisa menciptakan system pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Di Indonesia pemegang kekuasaan ekonomi itu adalah partai atau koalisi. Dimana kekuasaan yang dimiliki memberikan wewenang/power kepada calon dalam memengaruhi perilaku individu-individu yang ada di masyarakat. Perusahaan besar yang

¹² <https://www.kompasiana.com/baniaziz/552fcfcc6ea834d33f8b468b/politik-dinasti-dan-realita-demokrasi>, diakses pada 11 Desember 2019, pukul 22.22

memiliki kekuatan ekonomi dapat melakukan lobby politik yang dapat mempengaruhi situasi politik.¹³ Di Kota Bontang masih adanya system dimana perusahaan besar bekerjasama dengan pemerintah untuk mewujudkan ekonomi Kota Bontang dengan contoh membuat pariwisata, memberikan fasilitas kepada masyarakat ternak atau pertanian. Dalam hal ini ilmu ekonomi yang terkait dengan sumber daya yang tersedia di suatu wilayah akan bersifat terbatas, karena mengalokasikan sumber daya di antara kelompok masyarakat adalah power yang dipegang oleh pemimpin yang berkuasa(politik). Dengan menggunakan sumber daya pemimpin yang mempunyai power berhak menentukan jenis barang dan jasa apa yang akan diproduksi dalam bidang industry maupun jasa. Kekuatan politik memengaruhi bagaimana system ekonomi di suatu wilayah bekerja.

1.5.1.3 Politik Dinasti di Era Reformasi

Dinasti politik di Indonesia terjadi sejak orde baru dengan kuatnya hegemoni pemerintah, Golkar, dalam sistem politik di Indonesia membuat lembaga perwakilan rakyat yang seharusnya melakukan sistem pengawasan terhadap pemerintah hampir sama sekali mandul.¹⁴ Padahal wakil rakyat harusnya mengawasi dan menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat. Lengsernya Soeharto membangkitkan semangat baru dalam sistem politik Indonesia tidak banyak yang berubah, para pengamat mengatakan bahwa anggota-anggota legislatif lebih cenderung mementingkan kepentingan pribadi kerabatnya dibandingkan dengan memperjuangkan aspirasi rakyat. Adanya kesempatan politik, terutama dengan demokrasi langsung (pilkada langsung), sistem multi partai, sistem pemilu proporsional dengan suara terbanyak memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kandidat dari keluarga politik, terutama dari keluarga politik dengan pendanaan yang memadai untuk memenangkan pemilu/pilkada. Pada era reformasi ini, jumlah anggota keluarga politik yang memperoleh jabatan politik semakin banyak.

¹³ Angga Aditya Pratama yang berjudul “Pengaruh politik terhadap bisnis”, https://www.academia.edu/8729022/pengaruh_politik_terhadap_bisnis, diakses pada 11 Desember 2019, pukul 22.31

¹⁴ Winarno Budi. 2007. Sistem politik Indonesia era reformasi. Yogyakarta: Media Pesindo hlm 94

Pada tahun 1945-1959 Soekarno menolak system demokrasi parlementer Barat dan mengajukan demokrasi Indonesia. Dia menganggap golongan semacam itu bisa menjadi saluran terbaik dalam kegiatan politik. Tahun 1957 golongan itu disebut golongan fungsional. Golongan ini dikoordinasikan melalui suatu partai pemerintahan besar, organisasi ini mewujudkan pencapaian kolektivitas dan asas kekeluargaan. Kehidupan politik diatur dalam kehidupan negara oleh satu partai dan perwakilan melallui golongan fungsional dalam masyarakat dan bukan melalui partai politik yang bersaing, melainkan mencerminkan pertentangan ideology. Dalam organisasi partai golongan karya yang disediakan lebih efektif bagi masyarakat, sehingga bisa mempresentasikan keterwakilan kolektif dalam bentuk demokrasi yang kerap digunakan oleh Bung Karno, Prof Soepomo, dan Ki Hajar Dewantara sesuai dengan jiwa masyarakat.¹⁵ Dengan ini partai bekarya mendapatkan kesempatan yag cukup luas untuk menyebarluaskan pesan mereka dan memperoleh peran penting. Asas-asas pancasila dapat dengan mdah menjadi prinsip suatu partai. Dalam kepemimpinan untuk rakyat dan kekeluargaan sendiri yang menentukan bentuk politik yang lebih spesifik dan berharap partai juga akan melakukan hal yang sama.

Dinasti politik yang terdapat pada masyarakat dengan tingkat pendidikan politik yang rendah, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah serta pelembagaan politik yang belum mantap, maka dinasti politik dapat berarti negatif. Istilah lain yang sepadan dengan pengertian dinasti politik adalah tren politik kekerabatan. Indikasi munculnya praktik politik dinasti di Kota Bontang sudah terlihat sejak pilihan Waikota pada tahun 1999-2021. Dengan tanggapan bahwa mereka terpilih oleh rakyat dan sepenuhnya oleh rakyat. Adanya hal yang kemudian mendorong adanya hubungan kedekatan maupun romantisme antara pemimpin dengan rakyatnya sehingga pemimpin mudah dalam membentuk politik persuasive melalui gelontoran uang hingga ke pelosok. Berkaitan dengan suksesi kepemimpinan, politisasi birokrat maupun sosialisasi tokoh informal masyarakat menjadi bagian intimitas yang bertindak sebagai agen intermediasi dalam memenangkan dan melanggengkan kekuasaan famili politik.

¹⁵ David Reeve, *Golkar Sejarah Yang Hilang: Akar Pemikiran dan Dinamika*, Komunitas Bambu, 2013

Penggunaan sistem demokrasi di Indonesia salah satunya diwujudkan dengan adanya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.¹⁶ Dengan adanya peraturan ini sistem pemerintahan tidak lagi terpusat seperti yang terjadi pada masa orde baru. pemerintahan dijalankan dengan asas desentralisasi dimana daerah mempunyai otonomi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri kecuali lima urusan nasional. Peraturan ini berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah secara hampir menyeluruh, salah satunya dalam hal pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Dalam peraturan baru mengenai pemerintahan daerah ini, kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dipilih secara langsung melalui pemilukada. Adanya peraturan tersebut membawa kehidupan demokrasi di tingkat lokal menjadi lebih demokratis karena rakyat dapat memilih secara langsung pemimpin daerahnya. Namun hal tersebut tidak tanpa resiko, dibalik segala keagungannya dalam menjamin demokrasi lokal, pro kontra terhadap pemilukada langsung ini banyak terjadi. Banyak alasan penolakan terhadap mekanisme ini, dari segi ekonomis yang menghabiskan banyak dana, dari segi sosial dimana banyak menimbulkan konflik, dan hal-hal lainnya. Namun apabila dicermati lebih lanjut, ada hal yang cukup menonjol yang bisa diamati dari proses pilkada di Indonesia, salah satunya adalah mencuatnya dinasti politik.

Politik dinasti adalah pilihan rasional bagi politisi yang ingin memperpanjang dan memperkuat cengkeraman mereka atas politik lokal. Politik dinasti memungkinkan petahana di tingkat subnasional untuk berhadapan dengan batas waktu kepemimpinan (Chandra 2016). Politik dinasti juga dapat menjadi jaminan bahwa anggotanya tidak kehilangan tempat bernaung, karena keluarga merupakan satu kesatuan. Selain itu, politik dinasti membantu politisi lokal untuk memperluas kekuasaan mereka melampaui kubu-kubu teritorial. Dalam kasus saat petahana dari politik dinasti ini memilih memperluas kekuasaan mereka pada dewan legislatif lokal di provinsi/kabupaten/kota yang sama, cara politik ini dapat membantu mereka untuk

¹⁶ Diakses <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=339>

mendapatkan persetujuan legislatif atas tujuan mereka. Menempati kursi di dewan legislatif lokal juga berguna untuk membangun latar-belakang bagi para anggota keluarga petahana untuk kemajuan karier mereka selanjutnya.

Pranata yang ketiga (yakni, jaminan hak politik warga, kesetaraan di hadapan hukum, dan hak untuk bebas dari segala jenis diskriminasi), dengan didukung dua pranata pertama tersebut, telah memungkinkan politik dinasti subnasional bertahan dalam politik Indonesia duapuluh tahun setelah Reformasi bermula pada 1998. Di tahun 2015, menanggapi uji materi yang diajukan oleh politisi dinasti, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia mencabut pasal anti-dinasti dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Amandemen UU No. 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah sebagai pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilu Subnasional. Menurut Mahkamah, pasal itu menimbulkan hambatan konstitusional bagi warga negara tertentu untuk memperoleh hak konstitusional mereka, hanya karena mereka memiliki ikatan keluarga dengan para penguasa. Putusan Mahkamah ini justru memperkuat landasan hukum bagi para calon politisi untuk membangun dinasti politik mereka. Hal ini menempatkan MK dan para politisi dinasti dalam suatu hubungan yang ganjil: MK memiliki reputasi sebagai penjaga demokrasi Indonesia, tetapi politisi dinasti telah menumbangkan tujuan awal MK, yakni untuk mempertahankan konstitusi Indonesia yang demokratis, yang justru demi melindungi kepentingan politik keluarga mereka telah berhasil menghalangi sirkulasi sehat bagi para elite di tingkat subnasional dan merusak kualitas demokrasi lokal.¹⁷

Pada era saat ini, politik dinasti di pemerintahan local masih terbilang sangat banyak dijumpi, sebagai contoh di Kalimantan timur kota bontang. Masyarakat belum banyak mengetahui bahwa pemerintahan kota bontang termasuk kategori pemerintahan politik dinasti. Dalam hal ini elit politik local juga mempunyai potensi dalam menentang kebijakan local. Pada orde baru partai politik yang melakuka demokrasi, sebaliknya di era reformasi partai politiklah yang melakukan kooptasi terhadap birokrasi.

¹⁷ YOES C. KENAWAS yang berjudul “Para Elite Subnasional selama Rezim Suharto”, <https://kyotoreview.org/issue-24/duapuluh-tahun-setelah-rezim-suharto-politik-dinasti-dan-tanda-tanda-otoritarianisme-subnasional/> diakses pada 10 Desember 2019, pukul 20.05

1.5.1.4. Politik Dinasti dalam Pemerintahan Lokal

Kota Bontang kembali mencuat lantaran tak beda dengan pencalonan setiap tahun nya setiap partai politik mengusung untuk mencalonkan diri kembali dalam pencalonan pilkada 2020. Dalam bentuk kekuasaan yang dicari, diraih, dibangun dan dipertahankan demi memfasilitasi kepentingan keluarga mengatasnamakan bangsa dan negara. Demokrasi digerogoti politik dinasti. Implikasinya, kehidupan masyarakat kecil tetap saja jauh dari sejahtera. Masyarakat yang memang kekurangan sebagian di bantu oleh pemimpin perempuan Kota Bontang. Tetapi, semakin mereka mendapatkan kemenangan karena lawan mereka kalah kuat sebagian dari mereka memamerkan kemewahan mereka dalam pemilihan.

Menurut pembuat penelitian, keterpurukan masa kini akibat pengkhianatan amanat reformasi.¹⁸ Berbagai pembenaran tentang politik kedinastian sama dengan rekayasa pada masa lalu. Membiarkannya berlarut-lartut bisa menjadi bom waktu. Harapan tercurah kepada saudara-saudara dari kalangan elit agar segera memberkan peluang bagi mereka yang ingin benar-benar maju dalam kemenangan. Menyadari kekeliruannya. Membangun kekuatan politik wajib menjauhi praktek dinasti. Parpol bukan perusahaan keluarga yang dapat sesuka-suka mendudukan anak, istri, suami dan keluarga pada posisi penentu arah.

Etika politik setingkat itu sulit diterapkan, tapi harus segera diyakini sebagai nilai keagungan bagi elit berjiwa ksatria. Parpol hanya layak menjadi kendaraan anak bangsa untuk terpilih menjadi pepajat penyelenggara negara tanpa terbentur kedinastian. Kita kalangan masyarakat kecil yang paling merasakan pahitnya, maka pada pemilu mendatang di bilik pencoblosan tidak terkecoh menentukan pilihan.

Dalam system sosial, perkembangan partai politik tidak terlepas dari kesanggupan para elitnya untuk menjalankan strategi kepemimpinan, yang kemudian dapat menumbuhkan kesadaran, menggerakkan kader partai, dan berbagai hal yang pada

¹⁸ Poskotanews yang berjudul “Implikasi Politik Dinasti”, <https://poskotanews.com/2013/10/22/implikasi-politik-dinasti/> diakses pada 10 Desember 2019, pukul 22.56

dasarnya sangat mengoptimalkan fungsi dan peranan parpo dalam menegedepankan teori elite untuk memperoleh suatu kedudukan. Dari beragam pendapat ahli tentang elite, Suzanna Keller mengelompokkan 2 aliran.¹⁹

Pertama, golongan elite adalah golongan tunggal, yang biasa disebut elite politik.

Kedua, sejumlah kaum elite yang berkoeksistensi, berbagai kekuasaan, tanggung jawab, dan hak-hak atau imbalan.

Setiap masyarakat diperintahkan oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan social dan politik. Yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Orang-orang yang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat (Varma, 1987, hlm. 202). Lapisan elite yang berkuasa dengan sebutan *classe politica/political elite* yang merupakan kelompok organisasi yang memiliki kewenangan politik dalam bidang social dan ekonomi. Biasanya kaum elite menunjukkan semua fungsi politik, seperti monopoli kekuasaan dan menikmati setiap keuntungan dari kekuasaan. Kelas politik yang tidak menyesuaikan diri dengan zaman maka ia tidak akan bisa bertahan.

Jika sebuah sumber kekayaan baru terbentuk didalam masyarakat, maka artinya penting bagi pengetahuan yang meningkat, agama tua merosot atau lahir yang baru, aliran gagasan baru eluas, dan secara bersamman, dislokasi hebat terjadi dalam kelas penguasa. Secara umum, terdapat tiga sudut pandang teori elite. *Pertama*, dari sudut pandang struktur. Lebih menekankan kedudukan elite dalam struktur masyarakat. Struktur masyarakat memegang peranan penting dalam aktivitas masyarakat. Kedudukan tersebut menduduki kedudukan social yang melekat, missal keturunan dan kasta. Tetapi, tetap saja kaum elite mendapatkan lapisan paling atas dari struktur masyarakat biasa. *Kedua*, sudut pandang lembaga atau organisasi. Lembaga atau organisasi yang dapat atau menjadi pendukung elite dlam perannya pada masyarakatnya. Pemebentukan dan pengaruh peranan elite adalah lembaga atau organisasi tempat yang berada. Setiap individu atau kelompok dapat menjadi kelompok yang berpengaruh atau berperan karena berada dalam

¹⁹ Suzanna Keller, *Penguasa dan Kelompok Elite; Peranan Elit dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995, hlm. 5

organisasi atau lembaga. *Ketiga*, sudut pandang sumber daya kekuasaan. Kelompok elite yang terdiri atas mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominan dalam masyarakat karena nilai yang dibentuk atau diciptakan dan dihargai tinggi oleh masyarakat.

Mosca yang mengembangkan teori elite politik. Menurutnya, dalam semua lapisan masyarakat, mulai dari yang paling giat mengembangkan diri serta mencapai fajar peradaban, hingga masyarakat paling maju dan kuat, selalu muncul dua kelas, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah (Muslim Mufti, Msi, 2012, hlm. 73).²⁰ Kecakapan untuk memimpin dan menjalankan control politik yang lebih baik, kelas berkuasa akan dijatuhkan dan digantikan oleh kelas penguasa yang baru. Apabila kaum elite yang berkuasa maka tidak akan mampu lagi memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh massa yang diberikan dianggap tidak ternilai, pasti akan ada muncul beberapa organisasi yang terjadi pada kekuatan social yang ada dalam masyarakat. Meskipun elite sering dipandang sebagai kelompok yang terpadu, anggota-anggota elite dengan elite lain sering bersaing dan berbeda kepentingan. Kekuasaan atau sirkulasi elite, konflik bisa terjadi dalam internal elite.

Dinasti politik dikaitkan dengan demokrasi, secara prinsipil hal tersebut merupakan sebuah hal wajar dan sah-sah saja untuk dilakukan. Dinasti politik secara sederhana memang dapat dimaknai sebagai penggunaan dan perwujudan hak-hak dinasti politik dikaitkan dengan demokrasi, secara prinsipil hal tersebut merupakan sebuah hal wajar dan sah-sah saja untuk dilakukan. Dinasti politik secara sederhana memang dapat dimaknai sebagai penggunaan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dalam “memilih dan dipilih”. Masyarakat memilih dengan kekuatan finansial mereka yaitu kuatnya komitmen dalam pemimpin pemerintahannya, kuatnya modal yang keluar dalam pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Persoalan paling mendasar dimana partai politik local ada hubungannya dengan struktur pemerintahan daerah. Kehadiran partai tersebut untuk memperkuat kebijakan otonomi daerah, dimana kebijakan yang mereka berikan kepada masing-masing pengurus adalah pendukung kuat untuk maju menjadi pemimpin kembali. Adanya hubungan legislative dan eksekutif dalam partai politik dan pemerintah daerah melibatkan kepercayaan masyarakat untuk

²⁰ Muslim Mufti, Msi. *Teori-teori politik*, Bandung; Pustaka Setia, 2012, hlm. 73

mempertimbangkan kembali siapa yang pantas maju kembali dalam memimpin kota bontang. Sebagian masyarakat kota bontang mendukung kembali Neni Moernaeni menjadi walikota ditahun 2021-2024, sebagian masyarakat menginginkan beliau untuk tidak menjabat kembali, dengan alasan masyarakat ingin memiliki pemimpin yang baru dan inovasi yang baru.

Secara formal, yang disebut dengan elit politik local ialah para pengambil keutusan terutama Gubernur/Wakilnya dan/atau Bupati/Walikota dan Wakilnya, serta seluruh anggota DPRD. Merekalah para pengambil keputusan politik yang mengendalikan, melaksanakan, mengawasi pembangunan di satu daerah(Dede S.K., 2019)²¹.

Secara umum, basis fondasi kekuasaan formal dinasti politik lokal di Indonesia dibangun berdasarkan hubungan paternalistik melalui redistribusi program populis yang dihasilkan melalui skema politik ‘gentong babi’ (*pork barrel politics*) maupun politisasi siklus anggaran (*politic budget cycle*). Hal itulah yang kemudian mendorong adanya hubungan kedekatan maupun romantisme antara pemimpin dengan rakyatnya sehingga pemimpin mudah dalam membentuk politik persuasif melalui gelontoran uang hingga ke pelosok. Berkaitan dengan suksesi kepemimpinan, politisasi birokrat maupun sosialisasi tokoh informal masyarakat menjadi bagian intimitas yang bertidak sebagai agen intermediasi dalam memenangkan dan melanggengkan kekuasaan famili politik(Wasisto Raharjo Djati, 2013).²²

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasar tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun. Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini

²¹ Dede Sri Kartini. “Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penyelenggaraan Kampanye”, <https://bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/KAMPANYE%20EBOOK.pdf> diakses pada 10 Desember 2019, pukul 13.15

²² Wasisto Raharjo Djati yang berjudul “*Revivalisme Kekuasaan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal*”, <file:///C:/Users/Axioo/Downloads/3726-7062-1-PB.pdf> diakses 16 November 2019, pukul 23.15

adalah untuk mengetahui Keputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 33/PUU-XIII/2015, yang menyatakan Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bertentangan dengan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, mencemaskan banyak kalangan karena dianggap semakin menyuburkan politik dinasti. Dimana pemimpin melanggengkan kekuasaannya dengan mencalonkan kembali menjadi bakal calon walikota 2021 dan putranya sudah menjabat menjadi DPRD Kota Bontang. Suatu parpol yang mengusung dan mengawasi kinerja pemimpin dengan membuat suatu kebijakan agar masyarakat tetap percaya dan memilih kembali bakal calon yang sama.

1.7 Opereasionalisasi Konsep

Hubungan kerja antara Walikota dengan Pemerintah daerah merupakan suatu hasil dari adanya demokrasi, dimana pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu sendiri, selain itu hubungan kerja antara Walikota dengan Pemerintah Daerah diperkuat melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila didasarkan pada teori patron-client maka pengurus dan juga kader parpol memiliki posisi sebagai penguasa yang melanggengkan kekuasaan dimana parpol memiliki kuasa untuk memberikan mandat tugas kepada DPRD dan Pemerintah Daerah yang merupakan agen dari rakyat itu sendiri, hal ini dikarenakan Anggota Legislatif dalam hal ini adalah DPRD dan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Fungsi Pengawasan Bentuk dan Mekanisme Pengawasan pemerintah Kota Bontang dalam pemerintahan Pembuatan kebijakan Kendala – kendala dan upaya mengatasinya.

Persebaran kekuasaan dengan model desentralisasi, menjadi sebuah konsekuensi logis. Seiring berjalannya proses demokratisasi di Indonesia, partai politik muncul sebagai sebuah kekuatan politik penting dalam berbagai dinamika sosial yang ada. Ketika partai politik turut menentukan nasib sumberdaya publik maka partai kemudian menjelma menjadi patron baru dalam relasi patron-klien. Melemahnya Negara pusat tidak secara otomatis membuahkan demokrasi lokal yang lebih kuat. Sebaliknya, desentralisasi di bawah kondisi-kondisi tertentu bisa dibarengi dengan bentuk-bentuk pemerintahan otoriter, dengan munculnya bos-bos lokal yang terjun ke dalam politik dengan kendaraan partai politik dan menjadi kepala daerah.

Sehingga patron-klien yang awalnya terpusat, menjadi lebih tersebar di daerah. Dan partai politik menjadi kendaraan yang cukup penting. Partai Golkar lebih banyak mewarisi sistem ini, karena pengalaman memerintah dalam kurun waktu tiga dasawarsa. Hal ini juga berlaku di ranah lokal.

Dengan menggunakan teori patron-klien dalam partai politik, dimana hubungan timbal balik, kesukarelawan, eksploitasi, dominasi, dan asimetri mewarnai terjadi pola relasi ini. Pola relasi ini telah mampu membentuk rezim kekuasaan yang cukup lama dan kuat dengan memanfaatkan kekuatan sumber daya ekonomi yang kuat. Namun relasi patron-klien telah mendorong matinya demokrasi berbasis gagasan dan berkembangnya demokrasi pencitraan dan transaksional. Relasi patron-klien telah menjadikan masyarakat sebagai komoditas yang diperjual belikan oleh para politisi untuk meraih kekuasaannya. Masyarakat pun tidak lagi memilih pemimpin negeri atas dasar kapasitas dan integritas, melainkan dengan hanya pertimbangan pencitraan. Dan secara institusi, relasi patron klien telah melemahkan kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan di partai politik.

1.8 Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisa kualitatif. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk menganalisa fenomena sosial tertentu secara cermat dan analitis dengan membuat deskripsi mengenai situasi atau kejadian sosial.

1.8.1 Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh peneliti dari wawancara mendalam terhadap informasi, yang meliputi aparat pemerintahan Daerah Kota Bontang, tokoh masyarakat serta penduduk Kota Bontang. Peneliti menggunakan *interviewguide* atau daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan-informan terkait tingkat kemampuan aparat pemerintahan Kota Bontang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang mendukung pembahasan, tetapi diperoleh dari objek-objek lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur. Berkaitan dengan Pemerintah Kota Bontang dan masyarakatnya.

1.8.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang relevan, penulis menggunakan beberapa teknik, antara lain:

1. Metode Dokumentasi

Menurut Moleong, dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.²³ Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan memperhatikan sumber-sumber tertulis, seperti laporan tahunan, data profil Kota Bontang, monografi desa dan lainnya.

2. Metode Observasi (Pengamatan)

Pengumpulan data melalui pengamatan langsung, mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala obyek yang diteliti.²⁴ Kegunaannya adalah untuk mengetahui bagaimana suatu struktur itu dan bagaimana kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kota Bontang, sebagai bahan penelitian.

3. Wawancara

²³ Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung Hal 216

²⁴ Agus salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku sumber untuk Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Tiara Wacana,2006), Hal 14.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.²⁵

Dalam penelitian kualitatif, wawancara merupakan cara paling utama untuk menjangkau informasi secara langsung dari informan. Wawancara adalah teknik pengumpulan data, dimana tugas pengumpulan data berhadapan dengan informan, pertanyaan dan jawaban dilakukan secara lisan dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri. Wawancara ini dilakukan dengan aparat pemerintahan Kota Bontang lainnya dengan tema politik dinasti terhadap pemimpin dan partai politik di pemerintah, LSM, Tokoh Agama, dan Masyarakat di Kota Bontang tersebut.

1.8.3. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisis adalah:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, dokumen, data statistik dan sebagainya.
2. Mengadakan reduksi data, membuat rangkuman yang inti proses-proses dan pernyataan yang perlu dijaga.
3. Mengadakan pemeriksaan dan penafsiran data.

Untuk melakukan interpretasi dan inferensi data dilakukan dengan cara:

- a. Interpretasi secara terbatas karena peneliti hanya melakukan interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitian.
- b. Peneliti mencoba mencari pengertian yang lebih luas tentang hasil-hasil yang didapatkan dari analisis.
- c. Hal ini dilakukan dengan membandingkan analisisnya dengan kesimpulan peneliti lain dan menghubungkan kembali interpretasinya dengan teori yang ada.

²⁵ Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif pendekatan, (Jakarta:Kencana,2008), 56

1.8.4. Penyajian Hasil Analisis

Hasil penyajian dilakukan secara formal dan informal. Secara formal artinya data yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat Kota Bontang disajikan dalam bentuk tabel, sedangkan penyajian secara informal artinya hasil yang diperoleh melalui pengamatan lapangan dan wawancara terhadap informan disajikan dengan memberikan narasi atau penjelasan sehingga hasil yang diperoleh dapat menjawab permasalahan.